

Judul : Tak Hanya Andalkan Perusahaan Pelat Merah: Perbesar Peran Swasta Supaya Ekonomi Tumbuh
Tanggal : Sabtu, 02 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tak Hanya Andalkan Perusahaan Pelat Merah

Perbesar Peran Swasta Supaya Ekonomi Tumbuh

Senayan meminta Pemerintah memberikan porsi besar ke swasta dalam kegiatan ekonomi dan investasi. Bila itu terjadi, maka ekonomi akan tumbuh lebih tinggi.

WAKIL Ketua Komisi XI DPR Fathan Subhi mengatakan, pertumbuhan ekonomi terlalu lambat jika swasta tidak dilibatkan. Apalagi, Presiden Jokowi sudah berkali-kali meminta swasta terlibat aktif.

"Jadi, swasta harus dikasih porsi besar. Bila itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen-8 persen," ujar Fathan dalam diskusi bertajuk Menangkap Peluang Investasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Hadir dalam diskusi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmojo, Ketua Komite Bidang Pengembangan Investasi Daerah Reza Maspitella, dan sejumlah narasumber lainnya.

Sekretaris Fraksi PKB di DPR ini berharap, Pemerintah tidak hanya mengandalkan perusahaan pelat merah.

"Jadi, jangan sedikit-sedikit pelat merah, karena sesungguhnya APBN kita hanya Rp 2.300 triliun. Potensi swasta luar biasa sekali besarnya," kata dia.

Cucun Ahmad Syamsurijal menambahkan, kebangkitan ekonomi pascapandemi perlu kerjasama. Terutama bagaimana penguatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Agar Indonesia menjadi salah satu negara pusat pasar energi.

"Kalau kita bisa menata dan mengelola negara dengan benar, kita akan menjadi terdepan dan bisa setara dengan negara-negara lain, negara maju," ujar Cucun.

Ketua DPP PKB ini mengatakan, tantangan ke depan makin berat. Saat ini semua negara merasakan susahnyanya mengendalikan inflasi. Karena komoditas global terpengaruh perang Rusia-Ukraina.

"Kita menyaksikan perang Rusia-Ukraina yang tidak bisa diselesaikan secara cepat, sudah dirasakan dampaknya di sektor migas," kata Cucun.

Ini terjadi karena Rusia dan Ukraina merupakan produsen dan kontributor energi untuk sebagian belahan dunia. Hal ini akan menjadi satu guncangan bagi ekonomi seluruh dunia, bukan hanya Indonesia.

Bahlil Lahadalia mengomentari wacana penundaan pemilu. Jika dikaji secara komprehensif dan sesuai aturan, wacana tersebut bagus untuk investasi.

"Jangan dihindarkan (wacana penundaan pemilu), menurut saya sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa dan negara termasuk penundaan pemilu, itu wajar-wajar," klaim Bahlil.

Menurut Bahlil, parlemen sebagai lembaga demokrasi seharusnya memberi ruang terhadap berbagai wacana termasuk penundaan pemilu. Yang terpenting, wacana tersebut dibahas dan direalisasikan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

"Penundaan pemilu itu wajar-wajar saja asalkan berjalan sesuai konstitusi dan aturan UUD 1945," tandas Bahlil.

Sekarang, kata Bahlil, bolanya ada di parlemen, khususnya MPR yang keanggotaannya terdiri dari DPR dan DPD. MPR bisa memastikan apakah wacana penundaan pemilu bisa diwujudkan atau tidak melalui amandemen konstitusi atau UUD 1945.

"Tinggal bagaimana proses di parlemen. Boleh atau tidak. Monggo diselesaikan di sini," kata dia. ■ TIF